



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 25 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.



3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
6. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp4.295.120.783.702,00 berkurang sebesar Rp8.299.848.405,00 sehingga menjadi Rp4.286.820.935.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp4.004.151.303.185,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (43.293.120.357,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan | Rp3.960.858.182.828,00 |

b. Belanja Daerah:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp4.295.120.783.702,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp (8.299.848.405,00)</u> |
| Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan | <u>Rp4.286.820.935.297,00</u> |
| (Surplus/Defisit) | Rp (325.962.752.469,00) |

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a) Semula | Rp 321.026.720.036,00 |
| b) Bertambah | <u>Rp 34.993.271.952,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp 356.019.991.988,00 |



2. Pengeluaran:

| | | | |
|---|----|--------------------|--|
| a) Semula | Rp | 30.057.239.519,00 | |
| b) Bertambah/ Berkurang | Rp | 0,00 | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | 30.057.239.519,00 | |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan | Rp | 325.962.752.469,00 | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan | Rp | 0,00 | |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

| | | | |
|---|----|--------------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 715.980.715.185,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>25.766.968.062,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp | 741.747.683.247,00 | |

b. Pendapatan Transfer:

| | | | |
|--|----|----------------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 3.085.376.688.000,00 | |
| 2. Berkurang | Rp | <u>(69.060.088.419,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan | Rp | 3.016.316.599.581,00 | |

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

| | | | |
|--|----|--------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 202.793.900.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | Rp | 202.793.900.000,00 | |

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak Daerah:

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 286.873.217.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>25.766.968.062,00</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp | 312.640.185.062,00 | |

b. Retribusi Daerah:

| | | | |
|---|----|-------------------|--|
| 1. Semula | Rp | 34.604.571.750,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp | 34.604.571.750,00 | |



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:

| | | |
|--------------|-----------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 20.068.612.020,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 20.068.612.020,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

| | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 374.434.314.415,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp 374.434.314.415,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

| | | |
|--------------|-----------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.817.376.688.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(32.781.634.836,00)</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
setelah Perubahan Rp2.784.595.053.164,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah:

| | | |
|--------------|-----------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 268.000.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(36.278.453.583,00)</u> |

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
setelah Perubahan Rp 231.721.546.417,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:

a. Hibah:

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 9.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp 9.000.000.000,00

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:

| | | |
|--------------|-----------|--------------------|
| 1. Semula | Rp | 193.793.900.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
setelah Perubahan Rp 193.793.900.000,00



Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a. Belanja Operasi:

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp3.098.015.629.767,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 43.789.753.533,00</u> | |
| Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan | | Rp3.141.805.383.300,00 |

b. Belanja Modal:

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 575.501.674.750,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp (97.120.636.312,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp 478.381.038.438,00 |

c. Belanja Tidak Terduga:

| | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 13.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 43.636.738.053,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | Rp 56.636.738.053,00 |

d. Belanja Transfer:

| | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 608.603.479.185,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp 1.394.296.321,00</u> | |
| Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan | | Rp 609.997.775.506,00 |

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai:

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.694.623.736.786,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp (87.281.171.932,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp1.607.342.564.854,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa:

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp1.244.111.247.981,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 83.295.045.455,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp1.327.406.293.436,00 |

c. Belanja Hibah:

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 101.599.709.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 33.622.146.010,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp 135.221.855.010,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial:

| | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 57.680.936.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp 14.153.734.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp 71.834.670.000,00 |

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:



| | | |
|---|-----------|-----------------------------|
| a. Belanja Modal Tanah: | | |
| 1. Semula | Rp | 7.926.548.569,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(1.130.239.815,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan | | Rp 6.796.308.754,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin: | | |
| 1. Semula | Rp | 140.975.138.952,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>6.863.477.766,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | | Rp 147.838.616.718,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan: | | |
| 1. Semula | Rp | 44.228.221.198,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>14.707.845.500,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | | Rp 58.936.066.698,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi: | | |
| 1. Semula | Rp | 355.525.842.405,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(120.311.105.523,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan | | Rp 235.214.736.882,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya: | | |
| 1. Semula | Rp | 26.111.023.626,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>3.067.285.760,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | | Rp 29.178.309.386,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya: | | |
| 1. Semula | Rp | 734.900.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(317.900.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan | | Rp 417.000.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Penerimaan: | | |
| 1. Semula | Rp | 321.026.720.036,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>34.993.271.952,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp 356.019.991.988,00 |
| b. Pengeluaran: | | |
| 1. Semula | Rp | 30.057.239.519,00 |



| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------|-------------------|
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | Rp | | 30.057.239.519,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai berikut:
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA):
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| a. Semula | Rp | 321.026.720.036,00 | |
| b. Bertambah | Rp | <u>34.993.271.952,00</u> | |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) setelah Perubahan | Rp | | 356.019.991.988,00 |
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo:
- | | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp | 1.000.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah Perubahan | Rp | | 1.000.000.000,00 |
- b. Penyertaan Modal Daerah:
- | | | | |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp | 29.057.239.519,00 | |
| 2. Bertambah | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan | Rp | | 29.057.239.519,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 29 Oktober 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 4 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 216-4/2021



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Malang
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN MALANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

| Kode | Uraian | Jumlah (Rp) | | Bertambah/(Berkurang) | |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| | | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | (Rp) | % |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 321.026.720.036 | 356.019.991.988 | 34.993.271.952 | 11 % |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 30.057.239.519 | 30.057.239.519 | 0 | 0 % |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 29.057.239.519 | 29.057.239.519 | 0 | 0 % |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 0 % |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 30.057.239.519 | 30.057.239.519 | 0 | 0 % |
| | Pembiayaan Netto | 290.969.480.517 | 325.962.752.469 | 34.993.271.952 | 12 % |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan | 0 | (0) | (0) | 100 % |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 8 | 01 | | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 29.496.393.802 | 459.993.000 | 0 | 0 | 29.956.386.802 | 0 | 20.458.315.696 | 425.153.000 | 0 | 0 | 20.883.468.696 | |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 0 | 29.496.393.802 | 459.993.000 | 0 | 0 | 29.956.386.802 | 0 | 20.458.315.696 | 425.153.000 | 0 | 0 | 20.883.468.696 | |
| TOTAL | | | | | 4.004.151.303.185 | 3.098.015.629.767 | 575.501.674.750 | 13.000.000.000 | 608.603.479.185 | 4.295.120.783.702 | 3.960.858.182.828 | 3.141.805.383.300 | 478.381.038.438 | 56.636.738.053 | 609.997.775.506 | 4.286.820.935.297 |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten
 Malang
 Nomor :
 Tanggal :

KABUPATEN MALANG
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.32 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

| Kode Rekening | | | | | | | | | | Uraian | Sebelum Perubahan | Sesudah Perubahan | Bertambah/(Berkurang) | Dasar Hukum |
|--------------------------------------|----|------------------------|----|------|----|---|---|----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 01 | 2.09 | 11 | 5 | 1 | | | BELANJA OPERASI | 34.998.000 | 16.861.000 | (18.137.000) | |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 01 | 2.09 | 11 | 5 | 1 | 02 | | Belanja Barang dan Jasa | 34.998.000 | 16.861.000 | (18.137.000) | |
| Jumlah Belanja | | | | | | | | | | | 29.956.386.802 | 20.883.468.696 | (9.072.918.106) | |
| Total Surplus/(Defisit) | | | | | | | | | | | (29.956.386.802) | (20.883.468.696) | 9.072.918.106 | |
| 0 | 00 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 00 | 0.00 | 00 | 6 | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penerimaan Pengeluaran | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|------------------------|----|------|----|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 04 | 2.01 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 19.124.224.200 | 0 | 0 | 0 | 19.124.224.200 | 11.413.868.000 | 0 | 0 | 0 | 11.413.868.000 | (7.710.356.200) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 05 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 655.380.700 | 0 | 0 | 0 | 655.380.700 | 586.535.000 | 0 | 0 | 0 | 586.535.000 | (68.845.700) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 05 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 655.380.700 | 0 | 0 | 0 | 655.380.700 | 586.535.000 | 0 | 0 | 0 | 586.535.000 | (68.845.700) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 05 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 655.380.700 | 0 | 0 | 0 | 655.380.700 | 586.535.000 | 0 | 0 | 0 | 586.535.000 | (68.845.700) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 06 | | | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 776.611.100 | 0 | 0 | 0 | 776.611.100 | 361.754.900 | 0 | 0 | 0 | 361.754.900 | (414.856.200) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 06 | 2.01 | | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 776.611.100 | 0 | 0 | 0 | 776.611.100 | 361.754.900 | 0 | 0 | 0 | 361.754.900 | (414.856.200) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 06 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 186.963.000 | 0 | 0 | 0 | 186.963.000 | 17.705.400 | 0 | 0 | 0 | 17.705.400 | (169.257.600) |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 589.648.100 | 0 | 0 | 0 | 589.648.100 | 344.049.500 | 0 | 0 | 0 | 344.049.500 | (245.598.600) |
| TOTAL | | | | | | | 3.098.015.629.767 | 575.501.674.750 | 13.000.000.000 | 608.603.479.185 | 4.295.120.783.702 | 3.141.805.383.300 | 478.381.038.438 | 56.636.738.053 | 609.997.775.506 | 4.286.820.935.297 | (8.299.848.405) |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|---|----|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 11 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| 11 | 01 | 1 | 06 | Sosial | 9.789.286.900 | 13.632.000 | 0 | 0 | 9.802.918.900 | 6.941.936.900 | 0 | 0 | 0 | 6.941.936.900 | (2.860.982.000) |
| 11 | 02 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.803.879.800 | 0 | 0 | 0 | 1.803.879.800 | 1.327.110.500 | 0 | 0 | 0 | 1.327.110.500 | (476.769.300) |
| 11 | 03 | 3 | 32 | Transmigrasi | 682.991.000 | 0 | 0 | 0 | 682.991.000 | 332.468.600 | 0 | 0 | 0 | 332.468.600 | (350.522.400) |
| TOTAL | | | | | 3.098.015.629.767 | 575.501.674.750 | 13.000.000.000 | 608.603.479.185 | 4.295.120.783.702 | 3.141.805.383.300 | 478.381.038.438 | 56.636.738.053 | 609.997.775.506 | 4.286.820.935.297 | (8.299.848.405) |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------|------------------------|
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 2.000.000.000 | 187.719.000 | (1.812.281.000) |
| | | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | 25.000.000 | 0 | (25.000.000) |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | 45.000.000 | 55.540.000 | 10.540.000 |
| | | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 20.000.000 | 2.630.000 | (17.370.000) |
| | | Pemberian Layanan Rujukan | 25.000.000 | 44.170.000 | 19.170.000 |
| | Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | | 3.095.000.000 | 726.236.500 | (2.368.763.500) |
| | Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti | | 3.095.000.000 | 726.236.500 | (2.368.763.500) |
| Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | | | | | |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | | | |
| | | Penyediaan Makanan | 90.000.000 | 96.010.000 | 6.010.000 |
| | | Penyediaan Sandang | 45.000.000 | 0 | (45.000.000) |
| | Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | | 135.000.000 | 96.010.000 | (38.990.000) |
| | Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial | | 135.000.000 | 96.010.000 | (38.990.000) |
| | Jumlah SPM Bidang Sosial | | 3.230.000.000 | 822.246.500 | (2.407.753.500) |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | |
|---|----|----|--|---|----------------|----------------|-----------------|------|
| 8 | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN | 0 | 19.124.224.200 | 11.413.868.000 | (7.710.356.200) | 40% |
| 8 | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA | 0 | 655.380.700 | 586.535.000 | (68.845.700) | 11 % |
| 8 | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 0 | 776.611.100 | 361.754.900 | (414.856.200) | 53 % |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----|----|------|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 8.01.0.00.0.00.32.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 344.049.500 | 344.049.500 | 344.049.500 |
|------------------------|---|----|----|------|----|--|-------------|-------------|-------------|

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------|---|---|---|------------|-----|
| | | KECAMATAN PONCOKUSUMO | 78.237.000 | 0 | 0 | 0 | 78.237.000 | 869 |
| | | KECAMATAN BANTUR | 24.751.000 | 0 | 0 | 0 | 24.751.000 | 275 |
| | | KECAMATAN GEDANGAN | 10.405.000 | 0 | 0 | 0 | 10.405.000 | 116 |
| | | KECAMATAN TIRTOYUDO | 11.920.000 | 0 | 0 | 0 | 11.920.000 | 132 |
| | | KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 56 |
| | | KECAMATAN KEPANJEN | 3.080.000 | 0 | 0 | 0 | 3.080.000 | 34 |
| | | KECAMATAN PAKISAJI | 5.412.000 | 0 | 0 | 0 | 5.412.000 | 60 |

BUPATI MALANG,

ttd

SANUSI

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten
 Malang
 Nomor :
 Tanggal :

KABUPATEN MALANG
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

| GOLONGAN/ RUANG | ESELON | | | | | NON ESELON | | JUMLAH |
|----------------------------|----------|-----------|------------|------------|----------|-------------------|--------------|---------------|
| | I | II | III | IV | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF | |
| Golongan IV/e | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Golongan IV/d | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| Golongan IV/c | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 70 |
| Golongan IV/b | 0 | 8 | 73 | 3 | 0 | 2.006 | 3 | 2.093 |
| Golongan IV/a | 0 | 0 | 136 | 107 | 0 | 769 | 15 | 1.027 |
| JUMLAH GOLONGAN IV | 1 | 32 | 209 | 110 | 0 | 2.827 | 19 | 3.198 |
| Golongan III/d | 0 | 0 | 31 | 412 | 0 | 819 | 118 | 1.380 |
| Golongan III/c | 0 | 0 | 3 | 194 | 0 | 579 | 89 | 865 |
| Golongan III/b | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1.280 | 359 | 1.689 |
| Golongan III/a | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 793 | 1.172 | 1.981 |
| JUMLAH GOLONGAN III | 0 | 0 | 34 | 672 | 0 | 3.471 | 1.738 | 5.915 |
| Golongan II/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 368 | 515 |
| Golongan II/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 536 | 771 |
| Golongan II/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 303 | 356 |
| Golongan II/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 83 | 90 |
| JUMLAH GOLONGAN II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1.290 | 1.732 |
| Golongan I/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| Golongan I/c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Golongan I/b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Golongan I/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH GOLONGAN I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| TOTAL | 1 | 32 | 243 | 782 | 0 | 6.740 | 3.172 | 10.970 |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

| NO | URAIAN RINCIAN PIUTANG | SALDO AWAL PIUTANG | PENAMBAHAN PIUTANG | PENGURANGAN PIUTANG | SALDO AKHIR PIUTANG |
|-----------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 + 4 - 5 |
| 8 | CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH | (72.479.932.528,40) | (72.603.550.917,38) | (71.764.155.961,53) | (72.178.601,57) |
| 8.1 | Piutang Pajak | (69.141.914.148,47) | (69.143.396.216,47) | (68.751.691.239,42) | (68.750.209.171,42) |
| 8.2 | Piutang Retribusi | (3.770.359,82) | (6.135.770,30) | (108.315.966,93) | (105.950.556,45) |
| 8.3 | Piutang BLUD | (156.116.276,15) | (194.073.523,38) | (185.719.275,20) | (147.162.027,97) |
| 8.4 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat | (2.080.309.470,10) | (2.080.309.470,10) | - | - |
| 8.5 | Piutang Transfer Pemerintah Daerah lainnya | (44.754.330,00) | (126.567.993,27) | (81.813.663,27) | - |
| 8.6 | Bagian Lancar Piutang pada Perusahaan Daerah (PD Jasa Yasa) | (1.000.000.000,00) | (1.000.000.000,00) | (1.000.000.000,00) | (1.000.000.000,00) |
| 8.7 | Piutang Tuntutan Ganti Rugi | - | - | (3.031.430,00) | (3.031.430,00) |
| 8.8 | Piutang Lain-Lain | (53.067.943,86) | (53.067.943,86) | (20.825.415,74) | (20.825.415,74) |
| 9 | PIUTANG LAINNYA | 1.426.859.535,70 | 1.933.255.935,46 | 1.672.472.629,70 | 1.687.642.841,46 |
| 9.1 | Kendaraan Bermotor | 3.310.000,00 | - | - | 3.310.000,00 |
| 9.2 | Piutang SKPP | 677.124.262,00 | 417.768.030,00 | 926.047.356,00 | 168.844.936,00 |
| 9.3 | Piutang Lainnya (PERILN DINAS LN) DISPORA | - | 65.000.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 9.4 | Piutang PENDAPATAN LAINNYA- BKAD (PIUTANG DENDA RETRIBUSI) | - | - | - | - |
| 9.5 | Piutang Lainnya- DINAS SOSIAL | - | 862.500.000,00 | - | 862.500.000,00 |
| 9.6 | Piutang Lainnya - DINAS SOSIAL | - | 58.575.000,00 | - | 58.575.000,00 |
| 9.7 | Piutang Lainnya - SATPOL PP | - | 88.650.000,00 | - | 88.650.000,00 |
| 9.8 | Piutang Lain-lain- DINAS PU SDA | - | - | - | - |
| 9.9 | Piutang Lainnya-BKAD | - | 245.135.139,92 | - | 245.135.139,92 |
| | Piutang Lainnya - Kurang Volume Dinas Bina Marga | - | 71.318.821,56 | - | 71.318.821,56 |
| | Piutang Lainnya - Kurang Volume Dinas Kesehatan | - | 28.399.363,31 | - | 28.399.363,31 |
| | Piutang Lainnya - Kurang Volume Dinas Tanaman Pangan | - | 95.909.580,67 | - | 95.909.580,67 |
| 9.10 | Piutang Lainnya (Sisa Belanja) Kecamatan Dampit | 479.799,00 | - | 479.799,00 | - |
| 9.11 | Piutang Lainnya (Sisa Belanja) Kecamatan Ngantang | 2.520.000,00 | - | 2.520.000,00 | - |
| 9.12 | Piutang Lainnya (Sisa Belanja) Kecamatan Lawang | 147.200,00 | - | 147.200,00 | - |
| 9.13 | Piutang Lainnya (Piutang Sewa) Disperindag | 14.317.500,00 | - | 14.317.500,00 | - |
| 9.14 | Piutang Lainnya (Kurang Volume) Dinas Bina Marga | 728.960.774,70 | - | 728.960.774,70 | - |
| 10 | PIUTANG HASIL PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH | - | 55.503.368,00 | - | 55.503.368,00 |
| 10.1 | Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | - | 55.503.368,00 | - | 55.503.368,00 |
| 11 | PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA | - | 21.878.130,00 | - | 21.878.130,00 |
| 11.1 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | 21.878.130,00 | - | 21.878.130,00 |
| | JUMLAH | 97.878.322.071,30 | 2.667.262.391.651,12 | 2.677.636.525.069,97 | 107.996.766.983,89 |

BUPATIMALANG,

ttd.

SANUSI

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Malang
 Nomor :
 Tanggal :



PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

| No | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan | Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | Jumlah Penyertaan Modal daerah | Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan awal tahun | Penyertaan modal Tahun ini | Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun ini | Sisa Modal yang belum disertakan | Hasil Penyertaan modal (Investasi) daerah tahun ini | Jumlah modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini | Jumlah sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 + 8 | 10 = 6 - 9 | 11 | 12 | 13 = 9 - 12 |
| 1 | 1988 | PDAM | Perda Kab. Dati II Malang Nomor : 2 Tahun 1988, tentang Perubahan Pertama Perda Kab. Dati II Malang Nomor : 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum | Saham | 204.305.723.921,00 | 31.292.764.300,00 | 63.062.522.340,68 | 94.355.286.640,68 | 10.9.950.437.280,32 | - | - | 94.355.286.640,68 |
| 2 | 1993 | PD. Jasa Yasa | Perda Kab. Dati II Nomor 12 Thn 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kab. Dati II Malang | Saham | 10.408.738.065,74 | 13.355.777.379,97 | - | 13.355.777.379,97 | (2.947.039.314,23) | - | - | 13.355.777.379,97 |
| 3 | 2003 | PT. Kigumas | Perda Kab. Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Guia Mitik Masyarakat | Saham | 5.595.811.407,89 | 25.000.000.000,00 | (17.801.242.744,01) | 7.198.757.255,99 | (1.602.945848,10) | - | - | 7.198.757.255,99 |
| 4 | 2004 | PT. BPR Kanjuruhan | Perda Kab. Malang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas (PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kab. Malang Tambahan Penyertaan Modal 10223/SP2D LS/4.02.02.02/2018 | Saham | 13.026.306.740,00 | 10.000.000.000,00 | 1.761.393.856,00 | 11.761.393.856,00 | 3.264.912.884,00 | - | - | 11.761.393.856,00 |
| 5 | 2006 | BPD Jawa Timur | Perda Kab. Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim, Tbk | Saham | 63.408.861.250,00 | 63.408.861.250,00 | - | 63.408.861.250,00 | - | - | - | 63.408.861.250,00 |
| JUMLAH | | | | | 298.745.441.384,63 | 143.057.402.929,97 | 47.022.673.452,67 | 190.080.076.382,64 | 108.665.365.001,99 | - | - | 190.080.076.382,64 |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

| NO | URAIAN | SALDO AWAL (Neraca 2020) | PENAMBAHAN | PENGURANGAN | SALDO AKHIR |
|------|---|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 4.16 | Instalasi Gardu Listrik | 15.722.626.706,00 | - | - | 15.722.626.706,00 |
| 4.18 | Instalasi Gas | 113.071.000,00 | 53.240.000,00 | - | 166.311.000,00 |
| 4.20 | Jaringan Air Minum | 2.133.331.742,86 | - | - | 2.133.331.742,86 |
| 4.21 | Jaringan Listrik | 7.778.665.733,00 | 6.320.972.750,00 | 9.987.500,00 | 14.089.650.983,00 |
| 4.22 | Jaringan Telp | 1.729.129.450,00 | - | - | 1.729.129.450,00 |
| | | | | | |
| | Aset Tetap lainnya | 61.890.185.328,07 | 4.932.394.412,21 | 560.303.905,14 | 54.660.981.555,13 |
| 5.1 | Ternak | - | 931.500.000,00 | - | 931.500.000,00 |
| 5.2 | Buku | 32.130.948.528,15 | 45.834.658.860,81 | 49.441.431.176,14 | 28.524.176.212,82 |
| 5.3 | Terbitan | 472.264.708,41 | - | - | 472.264.708,41 |
| 5.4 | Barang-Barang Pemastakaan | 19.774.197.665,51 | - | 7.114.357.729,00 | 12.659.839.936,51 |
| 5.5 | Barang Bercorak Kebudayaan | 572.576.975,00 | 89.735.000,00 | 525.000,00 | 661.786.975,00 |
| 5.6 | Alat Olahraga Lainnya | 735.562.450,00 | 450.000,00 | 290.000,00 | 735.722.450,00 |
| 5.7 | Hewan | 961.631.001,00 | - | - | 961.631.001,00 |
| 5.8 | Tanaman | 6.719.010.000,00 | 2.369.695.571,39 | - | 9.088.705.571,39 |
| 5.9 | Aset Tetap Renovasi | 524.354.000,00 | 72.500.000,00 | 22.500.000,00 | 574.354.000,00 |
| 5.10 | Software/Website | 0,00 | 24.200.000,00 | 24.200.000,00 | - |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 57.119.234.258,00 | 23.526.338.752,82 | 13.001.861.877,81 | 67.643.711.173,00 |
| 6.1 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Lapangan Penimbun Barang | - | - | 15.413.600,00 | 15.413.600,00 |
| 6.2 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Kerja | 42.147.295.658,00 | 3.901.369.126,30 | 1985.367.676,30 | 44.063.297.108,00 |
| 6.3 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air Irigasi | 450.006.000,00 | 10.897.447.979,52 | 10.972.832.229,52 | 374.621.750,00 |
| 6.4 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Air Minum | 14.916.000,00 | - | - | 14.916.000,00 |
| 6.5 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Tegalan | 19.900.000,00 | - | - | 19.900.000,00 |
| 6.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor untuk Barang | 199.892.000,00 | - | - | 199.892.000,00 |
| 6.7 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah Perkampungan | 85.342.600,00 | 3.869.552.047,00 | 28.248.332,00 | 3.926.646.315,00 |
| 6.8 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Air | - | - | - | - |
| 6.9 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan | 11.005.657.000,00 | 46.976.600,00 | - | 11.052.633.600,00 |
| 6.10 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan | - | 4.810.993.000,00 | - | 4.810.993.000,00 |
| 6.11 | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jaringan Listrik | 3.196.225.000,00 | - | - | 3.196.225.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Jumlah | 10.271.389.896.588,10 | 1.090.389.212.740,57 | 453.638.294.836,22 | 10.908.140.814.492,40 |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK (MULTY YEARS)
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor :
Tanggal :

| No | Kode Kegiatan | Judul Kegiatan | Jumlah Realisasi Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 | | | | | | | | Jumlah Akumulasi Realisasi s.d Akhir Tahun 2020 | Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya |
|----|-----------------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|
| | | | Realisasi 2011 | Realisasi 2014 | Realisasi 2015 | Realisasi 2016 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1.03.1.03.05.01.02.03 | Pembangunan Gedung Kantor | | | | | | | | | | |
| | | - Pembangunan Jaringan Air Wringisingo (ESDM) | 49.755.000,00 | | | | | | | 49.755.000,00 | | |
| | | - Saluran Induk (PU SDA) | | | | | 601.273.000,00 | 399.540.000,00 | 65.850.321.658,00 | 19.335.250,00 | 17.870.461.908,00 | |
| | | - Pembangunan Kantor Kecamatan Darmat | | | | | | 14.916.000,00 | | | 14.916.000,00 | |
| | | - Pembangunan Klinik/Lab/Pa-kesmas RSUD Kanjuruhan | | | | | | 481.228.000,00 | 41.441.668,00 | | 522.669.668,00 | |
| | | - Pembangunan Gedung Kantor | | | | | 75.000.000,00 | | | | 75.000.000,00 | |
| | | - Tanah Tegalan | | | | | 19.900.000,00 | 8.706.600,00 | 15.413.600,00 | | 13.193.000,00 | |
| | | - Pembangunan Jembatan (Jurnal Koreksi) | | | | | | 10.873.959.500,00 | | 3.550.948.047,00 | 14.424.907.547,00 | |
| | | - Pembangunan Gedung Olahraga | | | | | | | | 1.412.429.700,00 | 1.412.429.700,00 | |
| | | - Realisasi dari Belanja Modal Gedung (CIPTA KARYA) | | | | | | | | 550.548.350,00 | 550.548.350,00 | |
| | | - Pembangunan Jembatan (CIPTA KARYA) | | | | | | | | 318.604.000,00 | 318.604.000,00 | |
| | | - Hibah dari Kementerian PUPR ke DPU BINA MARGA | | | | | | | | 4.810.993.000,00 | 4.810.993.000,00 | |
| | | Jumlah I | 49.755.000,00 | | | | 696.173.000,00 | 11.778.350.100,00 | 16.876.349.726,00 | 10.662.858.347,00 | 40.063.486.173,00 | |
| 2. | 2.06.1.03.05.01.22.01 | Penciptaan Sarana dan Prasarana Pasar | | | | | | | | | | |
| | | - Pembangunan Pasar Semi Modern Sumedang Kapanjen Tahap V | | 5.384.416.000,00 | | | | 4.992.431.000,00 | | | 10.376.847.000,00 | |
| | | - Pembangunan Pasar Semi Modern Sumedang Kapanjen Tahap VI | | | 4.741.438.000,00 | 2.439.950.000,00 | | 10.021.990.000,00 | | | 17.203.378.000,00 | |
| | | Jumlah II | | 5.384.416.000,00 | 4.741.438.000,00 | 2.439.950.000,00 | | 15.014.421.000,00 | | | 27.580.225.000,00 | |
| | | Jumlah I+II | 49.755.000,00 | 5.384.416.000,00 | 4.741.438.000,00 | 2.439.950.000,00 | 696.173.000,00 | 26.792.771.100,00 | 16.876.349.726,00 | 10.662.858.347,00 | 67.643.711.173,00 | |

BUPATI MALANG.

ttd.

SANUSI



PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG
DAFTAR DAN CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor :
Tanggal :

| NO | Tujuan Pembentukan Dana Cadangan | Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan | Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan | Saldo Awal | Transfer dari Kas Daerah Th. 2019 | Transfer ke Kas Daerah | Saldo Akhir | Sisa Dana yang belum Dicadangkan |
|---------------|---|---|--|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Agar tersedia dana cukup untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada periode tahun 2015 - 2020 | Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan | - | 50.000.000.000,00 | - | - | 50.000.000.000,00 | - |
| 2 | Bunga Dana Cadangan | | - | 5.338.118.775,22 | 1.547.755.041,13 | (56.798.998.150,40) | (49.913.124.334,05) | - |
| JUMLAH | | | - | 55.338.118.775,22 | 1.547.755.041,13 | (56.798.998.150,40) | 86.875.665,95 | - |

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Malang

Nomor :

Tanggal :

**KABUPATEN MALANG
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

| No | Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah | Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi | Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi | Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) | Jangka Waktu Pinjaman (tahun) | Persentase bunga pinjaman % | Tujuan Penggunaan Pinjaman | Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp) | | Jumlah Sisa Pembayaran | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | Pokok Pinjaman Daerah | Bunga | Pokok Pinjaman Daerah | Bunga |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah | | | | | | | | |

NIHIL

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI